**Studi Fenomenologi Pengalaman Warga dalam Mengelola Sampah: Menyingkap Makna di Balik Optimalisasi Pengelolaan Jasa Pengangkutan Sampah oleh BUMDes Mulyo Jaya di Desa Jati Mulyo.**

**Tugas Metode Penelitian Administrasi Publik**

**Oleh**

**EKA SEPTIYANA**

**2416041123**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2025**

# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

## 2.1 Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta kualitas hidup manusia. Menurut Kurniawan (2021), pengelolaan sampah tidak hanya sebatas pada kegiatan teknis seperti pengumpulan dan pembuangan, melainkan mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, hingga kelembagaan. Hal ini sejalan dengan konsep **Sustainable Development Goals (SDGs)** yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Secara umum, pengelolaan sampah meliputi tahapan **pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir**. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sistem pengelolaan harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu agar memberikan manfaat ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak boleh dipandang sebagai aktivitas teknis semata, tetapi juga sebagai strategi pembangunan berkelanjutan yang memberi kontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks desa, peran **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** menjadi signifikan. BUMDes dapat mengelola layanan persampahan secara terorganisir sehingga mampu mengurangi pencemaran, meningkatkan kesehatan masyarakat, sekaligus menciptakan peluang ekonomi melalui pemanfaatan sampah yang bernilai guna. Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara pengelolaan sampah dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keseimbangan ekologi dan ekonomi

## **2.2 Good Governance dalam Layanan Publik**

Konsep **Good Governance** merupakan kerangka penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif. Menurut UNDP (1997), Good Governance mencakup prinsip **partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.** Prinsip-prinsip ini bertujuan memastikan pelayanan publik dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan sampah desa, penerapan prinsip Good Governance dapat diwujudkan melalui:

1. **Transparansi,** misalnya pelaporan terbuka terkait penggunaan dana iuran sampah.
2. **Akuntabilitas**, berupa pertanggungjawaban BUMDes dalam memberikan layanan yang teratur dan sesuai standar.
3. **Efisiensi dan efektivitas**, dalam penggunaan armada serta sumber daya manusia agar layanan berjalan maksimal.
4. **Partisipasi masyarakat**, baik dalam membayar iuran, memilah sampah, maupun ikut serta dalam program daur ulang.
5. **Keadilan,** yaitu menjamin semua warga desa mendapatkan layanan yang sama tanpa diskriminasi.

Menurut Dwiyanto (2018), Good Governance bukan hanya konsep normatif, melainkan instrumen praktis untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia. Dengan kerangka ini, pengelolaan sampah yang dilakukan BUMDes dapat menjadi lebih transparan, berorientasi pada kepentingan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa.

## 2.3 Optimalisasi Jasa Pengangkutan Sampah

Optimalisasi dalam konteks pengangkutan sampah berarti bagaimana **sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif** untuk mencapai tujuan pelayanan yang maksimal. Sari (2020) menegaskan bahwa optimalisasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga manajerial, seperti perencanaan rute pengangkutan, pengaturan jadwal, hingga sistem pembayaran iuran.

Dalam perspektif **Teori Pelayanan Publik**, keberhasilan pengelolaan sampah diukur dari sejauh mana layanan tersebut **efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat** (Yuliana,2020). BUMDes sebagai penyedia jasa harus memastikan armada berjalan tepat waktu, tenaga kerja memadai, dan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi pengangkutan sampah tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga memperkuat posisi BUMDes sebagai lembaga pelayanan publik yang berfungsi profesional.

## 2.4 Ketersediaan Armada

Armada pengangkutan sampah adalah infrastruktur utama dalam sistem pengelolaan. Menurut penelitian Lestari (2019), keterbatasan armada sering menjadi hambatan yang mengakibatkan keterlambatan pengangkutan, penumpukan sampah, hingga turunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan.

BUMDes sebagai pengelola jasa sampah harus melakukan **perencanaan armada** yang sesuai dengan jumlah warga, volume sampah, serta kondisi geografis desa. Misalnya, di desa dengan akses jalan sempit, kendaraan roda tiga lebih sesuai dibandingkan truk besar. Dengan armada yang memadai dan terkelola dengan baik, operasional pengangkutan akan berjalan lancar, biaya tambahan akibat keterlambatan dapat ditekan, dan kualitas pelayanan publik meningkat.

## 2.5 Kesadaran Warga

Kesadaran masyarakat merupakan faktor sosial yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sampah. Putra (2021) menyebut bahwa rendahnya kesadaran warga menyebabkan banyak program pengelolaan sampah gagal meskipun fasilitas tersedia. Kesadaran warga dapat berbentuk:

* **Partisipasi pasif**, seperti kepatuhan membayar iuran dan mengikuti aturan pembuangan.
* **Partisipasi aktif**, misalnya memilah sampah rumah tangga, mengikuti pelatihan daur ulang, atau ikut gotong royong kebersihan.

Menurut (Dwiyanto) 2018, perilaku masyarakat adalah kunci dalam menjaga keberlanjutan program lingkungan. Tanpa adanya kesadaran kolektif, layanan sampah akan berjalan timpang. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan secara berkesinambungan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga mitra aktif dalam menjaga lingkungan.

## 2.6 Peran BUMDes dalam Layanan Publik

BUMDes memiliki posisi strategis dalam mendukung tata kelola desa yang baik melalui penyediaan layanan publik, salah satunya pengelolaan sampah. Menurut Yuliana (2020), BUMDes yang bergerak dalam bidang persampahan memberikan **dua manfaat utama**: (1) mengurangi masalah lingkungan dengan mengelola sampah secara teratur, dan (2) menambah pendapatan asli desa melalui iuran warga.

Peran ini membuktikan bahwa BUMDes tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga sosial. Dengan menerapkan prinsip Good Governance, BUMDes dapat menciptakan layanan publik yang lebih transparan, adil, partisipatif, serta akuntabel. Hal ini pada akhirnya mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan memberikan landasan empiris untuk studi ini dan membantu mengidentifikasi posisi penelitian ini di tengah diskursus ilmiah yang ada.

### **2.7.1 Ulasan Singkat dan Perbandingan Penelitian Terdahulu**

Beberapa studi telah mengkaji peran BUMDes dalam pengelolaan sampah di berbagai daerah. Penelitian oleh Asep Maryana (2022) dan Nisa & Saputro (2021) menunjukkan bahwa BUMDes memegang peran penting dalam memberdayakan masyarakat, baik secara ekonomi melalui program bank sampah maupun dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Studi-studi ini umumnya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, berfokus pada implementasi program dan dampaknya secara sosial ekonomi.

Di sisi lain, penelitian mengenai optimalisasi pengangkutan sampah sering kali menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebagai contoh, studi tentang optimalisasi sistem angkutan sampah menggunakan metode Vehicle Routing Problem (VRP) di Karawang berfokus pada efisiensi rute dan biaya, namun dilakukan dalam konteks perkotaan yang memiliki karakteristik berbeda dari pedesaan. Meskipun memberikan pemahaman tentang pentingnya efisiensi rute dan batasan kapasitas armada, penelitian ini tidak menyoroti secara mendalam peran BUMDes atau dinamika partisipasi masyarakat di daerah pedesaan.

Studi lain tentang partisipasi masyarakat, seperti yang dilakukan di Desa Baru, mengungkapkan bahwa partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat beragam, mulai dari sumbangan tenaga hingga barang, namun partisipasi finansial seringkali rendah. Sementara itu, penelitian tentang pengaruh sarana dan prasarana menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas yang memadai memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.

Tinjauan ini menunjukkan adanya celah yang signifikan dalam literatur yang ada. Banyak studi cenderung mengisolasi variabel-variabel yang diteliti. Mereka fokus pada peran BUMDes, atau optimalisasi rute, atau partisipasi masyarakat secara terpisah. Jarang ditemukan penelitian kualitatif yang mengintegrasikan ketiga variabel ini secara holistik, khususnya dalam konteks pengelolaan sampah di pedesaan oleh BUMDes. Penelitian ini hadir untuk menjembatani celah tersebut dengan mengkaji secara mendalam interaksi kausal antara ketersediaan armada dan tingkat kesadaran warga terhadap optimalisasi pengelolaan jasa pengangkutan sampah.

**Tabel 2.1** berikut menyajikan perbandingan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini:

| **No** | **Peneliti & Tahun** | **Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Gap dengan Penelitian Sekarang** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lestari (2019) | *Efektivitas Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa* | Pengelolaan sampah efektif jika ada dukungan kelembagaan dan armada yang memadai. | Belum membahas aspek partisipasi masyarakat dan peran BUMDes secara komprehensif. |
| 2 | Sari (2020) | *Optimalisasi Layanan Sampah oleh Lembaga Desa* | Layanan sampah menjadi optimal apabila manajemen armada berjalan baik dan ada kepuasan warga. | Tidak menyinggung dimensi kesadaran masyarakat dan kontribusi BUMDes dalam edukasi lingkungan. |
| 3 | Yuliana (2020) | *Peran BUMDes dalam Mengelola Sampah Desa* | BUMDes berkontribusi ganda: mengurangi sampah dan meningkatkan PADes. | Fokus terbatas hanya pada satu BUMDes, belum membandingkan faktor teknis dan sosial dalam pengelolaan sampah. |
| 4 | Putra (2021) | *Kesadaran Masyarakat dalam Mendukung Sistem Pengelolaan Sampah Desa* | Tingkat kesadaran masyarakat berpengaruh signifikan pada keberlanjutan pengelolaan sampah desa. | Tidak mengulas secara mendalam peran BUMDes sebagai penyedia layanan dan fasilitator edukasi. |

## 2.8 Kerangka Pikir

Alur pikir penelitian ini dimulai dari **masalah mendasar desa**, yaitu sulitnya mengelola sampah secara optimal. Untuk menjawab masalah tersebut, **BUMDes Mulyo Jaya** hadir sebagai lembaga pelayanan publik desa yang bertugas menyediakan jasa pengangkutan sampah.

Kerangka ini berasumsi bahwa **optimalisasi layanan pengangkutan sampah (Y)** dipengaruhi oleh **dua faktor utama:**

1. **Faktor Teknis (Ketersediaan Armada)** → dianalisis dengan konsep **Value for Money,** yang menilai sejauh mana pengadaan dan pengelolaan armada dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
2. **Faktor Sosial (Tingkat Kesadaran Warga)** → dianalisis dengan **Theory of Planned Behavior** (sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku) dan **Teori Modal Sosial** (kepercayaan, norma, gotong royong) untuk memahami partisipasi masyarakat.

Keduanya berinteraksi dalam sebuah **sistem layanan publik desa**, di mana **Good Governance** menjadi prinsip tata kelola yang mengarahkan agar layanan dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, dan responsif.

Selanjutnya, terdapat **feedback loop:** ketika BUMDes berhasil mengoptimalkan layanan (misalnya, pengangkutan teratur dan tepat waktu), maka kepercayaan sosial masyarakat meningkat. Kepercayaan ini memperkuat kesadaran dan partisipasi warga, yang pada akhirnya akan memperkuat keberlanjutan layanan.

Dengan demikian, kerangka pikir ini menyatukan **Grand Theory (Pembangunan Berkelanjutan), Middle Theory (Good Governance),** dan **Applied Theory (Pelayanan Publik, VfM, TPB, Social Capital)** dalam satu alur logis yang komprehensif.

Grand Theory: Pembangunan Berkelanjutan

↓

Middle Theory: Good Governance

↓

Variabel Bebas

Ketersediaan Armada | Kesadaran Warga

↓

(dipengaruhi oleh Value for Money,

Theory of Planned Behavior,

dan Social Capital)

↓

Optimalisasi Pengelolaan Jasa Pengangkutan Sampah

↓

Feedback Loop : meningkatkan kepercayaan & partisipasi warga

**DAFTAR PUSTAKA**

Dwiyanto, A. (2018). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kurniawan, A. (2021). Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Berkelanjutan. Jakarta: Rajawali Pers.

Lestari, A. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Lestari, D. (2021). *Ketersediaan sarana dan prasarana dalam layanan sampah desa Y*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

Maryana, A. (2022). *Peran BUMDes dalam pengelolaan sampah desa X*. Jurnal Administrasi Publik, 9(2), 55–67.

Nisa, F., & Saputro, E. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam program kebersihan lingkungan*. Jurnal Ilmu Sosial, 7(1), 34–46.

Putra, B. (2021). *Kesadaran Masyarakat dalam Mendukung Sistem Pengelolaan Sampah Desa*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 10(1), 88-102.

Saputro, A. (2020). *Optimalisasi sistem angkutan sampah di Kabupaten Karawang*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Sari, D. (2020). *Optimalisasi Layanan Sampah oleh Lembaga Desa*. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 45-57.

UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development. New York: United Nations Development Programme.

Yuliana, R. (2020). *Peran BUMDes dalam Mengelola Sampah Desa*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.